

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata diseluruh Indonesia merupakan salah satu tujuan pembangunan Negara. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut dapat tercapai apabila perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dan terencana dengan jalan peningkatan pembangunan, salah satu sumber pendukung penerimaan Negara untuk mencapai hal tersebut yaitu dari sektor pajak. Hampir seluruh kehidupan perorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga warga Indonesia diwajibkan untuk taat membayar pajak dan memahami ketentuan pajak yang telah ditetapkan. Pungutan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah retribusi dan sumbangan. Retribusi merupakan pungutan yang mendapat imbalan langsung dari pemerintah. Kemudian sumbangan, hal ini tidak dapat dicampurkan dengan retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati kontrapretasi dari pemerintah, sedangkan pada sumbangan; seseorang yang mendapat pretasi justru tidak dapat ditunjuk; hanya golongan tertentu saja yang dapat menikmati kontrapretasi tersebut. Dari perbedaan tersebut terlihat bahwa masing-masing penerimaan Negara memiliki imbalan yang berbeda sehingga tidak mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat yang notabennya pajak tidak dapat memberikan imbalan secara langsung terhadap masyarakat.

Maka, bila pembayaran pajak terlalu tinggi; masyarakat akan enggan membayar. Namun bila terlalu rendah; pembangunan tidak akan berjalan karena pemasukan dana Negara kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, pemungutan pajak harus memenuhi beberapa persyaratan berikut: (1) pemungutan pajak harus adil, (2) pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, (3) pemungutan pajak harus efisien, dan (4) sistem pemungutan pajaknya harus sederhana. Secara umum, pajak dapat dikenakan kepada subjek pajak atas objek pajak jenis pajaknya masing-masing. Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan pribadi wajib pajak, kemudian menetapkan objek pajaknya. Salah satu contohnya yaitu pajak pertambahan nilai. Sedangkan pajak subjektif merupakan pajak yang berpangkal, atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau atas penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan berfungsi untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pajak penghasilan dipungut oleh pemerintah pusat sehingga termasuk dalam jenis pajak langsung yang merupakan pajak pusat atau pajak Negara. Pajak penghasilan atau yang dikenal dengan *income tax* diatur dalam dua macam Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini

telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2. Undang-Undang Nomor 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini juga beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada dasarnya mengatur tentang ketentuan yang bersifat materiil dari PPh tersebut.

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut situs Dirjen Pajak, umumnya penghasilan jenis ini terjadi ketika adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 telah ditambah oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lain seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Tarif pajak untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan sebesar 15% dan 2% dibebankan pada jenis penghasilan lainnya. Apabila PPh Pasal 23 dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka tarif pajak dikenalkan dua kali lipat yaitu 30% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan. Serta 4% untuk jenis penghasilan lainnya. Jasa lainnya yang dimaksud tersebut adalah sewa dan penghasilan lainnya yang sehubungan

dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. Kemudian berupa imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.

Untuk dapat menjalankan bisnis utama, suatu perusahaan atau industri terkadang didukung oleh pekerjaan yang menunjang operasional perusahaan. Pekerjaan tersebut memerlukan keahlian tertentu yang tidak berhubungan dengan usaha inti perusahaan atau industri itu sendiri. Sebagai contoh, petugas kebersihan; petugas keamanan; operator telepon; dll. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, perusahaan atau industri menggunakan jasa tenaga kerja outsourcing atau alih daya. Jasa tenaga kerja outsourcing adalah tenaga kerja yang dikontrak dan didatangkan dari luar perusahaan dan disediakan khusus oleh penyedia jasa tenaga kerja untuk beberapa perusahaan yang membutuhkan jasa operasional tersebut. Bagi pihak pemakai jasa tenaga kerja outsourcing, hal ini sangat menguntungkan karena perusahaan tidak perlu repot merekrut karyawan yang akan memakan banyak waktu dan tenaga. Namun hal itu sedikit akan merugikan jasa tenaga kerja itu sendiri, kemungkinan besar selamanya mereka akan bekerja sesuai kontrak; sehingga kecil kemungkinan untuk menjadi karyawan tetap pada perusahaan tempat ia bekerja. Karena bekerja sesuai kontrak, maka hak dan fasilitas yang mereka terima berbeda dengan karyawan tetap lainnya. Sistem kerja outsourcing ini diakui oleh Indonesia dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (pasal 64, 65, 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004). Dari maka itu, penyedia tenaga kerja

outsourcing dianggap legal dalam Indonesia hingga saat ini penggunaan penyedia tenaga kerja tersebut semakin luas ke berbagai jenis pekerjaan yang bersifat *supporting* dari masing-masing perusahaan atau industri yang ada.

Salah satu tujuan penggunaan jasa tenaga kerja outsourcing adalah tuntutan masyarakat untuk adanya layanan yang terbaik. Hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab setiap instansi. Salah satu pengguna jasa tenaga kerja outsourcing di Surabaya adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

PDAM merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang distribusi air bersih bagi masyarakat umum dan terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bernama Surya Sembada tepat di Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.2, Pacarkeling, Tambaksari, Surabaya merupakan salah satu distribusi air bersih milik daerah tingkat II. Ada beberapa jenis tenaga kerja outsourcing yang disewa oleh perusahaan tersebut, salah satunya petugas keamanan; cleaning service; pelayanan publik; dll. Hal ini guna mencapai tujuan perusahaan dan mencapai tingkat tinggi kepuasan pelanggan, tentu dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut.

Pajak Penghasilan Pasal 23 salah satunya adalah jasa outsourcing, sehingga beberapa perusahaan/instansi tertentu yang menggunakan jasa tenaga kerja outsourcing diwajibkan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 dari jumlah bruto atas jasa yang dikenakan tersebut kepada kantor pajak. Dari setiap tindakan menghitung, memotong dan melaporkan biasanya akan ada sedikit

permasalahan yang timbul dikarenakan salah input atau salah perhitungan . Dalam hal tersebut, penulis akan menganalisis penerapan perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya.

Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menetapkan judul **“ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PASAL 23) ATAS JASA OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA SURABAYA”** sebagai tugas akhir penulis.

1.2 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan judul yang telah ditetapkan, maka penulis memiliki tujuan penulisan tugas akhir yaitu untuk menganalisis penerapan perhitungan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya.

1.3 Manfaat Tugas Akhir

Dalam penulisan tugas akhir ini juga terdapat manfaat yang dapat diberikan untuk pihak-pihak terkait. Pertama, bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan sehingga mendapat pengetahuan lebih sekaligus dapat menerapkan teori perpajakan yang didapat selama perkuliahan. Kedua, bagi pembaca diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penerapan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya

Sembada Kota Surabaya dan dapat bermanfaat sebagai informasi awal untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. Ketiga bagi perusahaan, dalam penulisan tugas akhir yang sebelumnya telah dilakukan praktik kerja lapang dan penelitian sehingga penulis berharap hal ini dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada dengan lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya khususnya Program Diploma Tiga Manajemen Pajak.

1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir

Penulis melakukan pembatasan mengenai pembahasan masalah ini, hal ini bertujuan agar arah pembahasan tidak terlalu luas. Maka penulis hanya akan membahas tentang penerapan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing) masa April hingga Juni tahun 2018 pada bagian Anggaran dan Kas di kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, kemudian mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Sehingga penulis melakukan pengamatan langsung pada bagian Anggaran dan Kas di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada.

2. Dokumentasi, adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Sehingga penulis akan mengumpulkan SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada sebagai data pendukung untuk perhitungan PPh Pasal 23 dalam tugas akhir penulis.
3. Wawancara, adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak untuk membahas dan menggali informasi tertentu guna mencapai tujuan tertentu pula. Sehingga penulis akan melakukan wawancara dengan ahli pajak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada yang menangani pajak penghasilan pasal 23 untuk mendapat informasi yang lebih konkret mengenai PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing yang berlaku pada perusahaan tersebut.